



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto dengan Kepala ANRI, Imam Gunarto pada 27 Juli 2022 lalu dalam rangka menyinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan kedua lembaga di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, dan kearsipan. (12/01/23).

KEPALA ANRI HADIRI PENCANANGAN GNSTA DAN PENANDATANGANAN PKS DENGAN KEMENTERIAN ATR/BPN

Jakarta (12/01) - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto menghadiri rangkaian acara Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (12/01).

Acara yang dilaksanakan secara luring dan daring ini diselenggarakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung program reformasi dan birokrasi, serta peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan secara nasional untuk meningkatkan pelayanan pertanahan Kementerian ATR/BPN.

Dalam sambutannya, Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan bahwa sejak penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* tahun lalu, ANRI dengan Kementerian ATR/BPN sudah bersepakat.

“Kami sadar bahwa peran kearsipan lebih banyak untuk *government*. Oleh karena itu, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ialah melalui kesempatan ini,” ungkap Kepala ANRI, Imam Gunarto.

Kepala ANRI menambahkan bahwa GNSTA menjadi salah satu program untuk menertibkan kearsipan. Jika pengelolaan arsip tertib maka bisa mendorong percepatan reformasi birokrasi dan layanan publik.

“Melalui kearsipan, ANRI akan mendukung program Kementerian ATR/BPN,” tutur Kepala ANRI, Imam Gunarto.

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dalam rangka pencanangan GNSTA. Ia menyebutkan bahwa dalam hal kearsipan, Kementerian ATR/BPN sendiri menghasilkan banyak produk dokumen pertanahan dalam rangka melayani masyarakat.

“Dokumen tersebut akan selalu ada selama tanahnya masih ada. Dengan warkah maka kita bisa melihat siapa pemilik tanah yang memiliki hak. Dan hal ini terbukti beberapa bulan lalu saat terdapat kasus, yang pada akhirnya dapat diselesaikan dengan membaca warkah,” ungkap Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto.

“Betapa pentingnya dokumen warkah tanah ini bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya hari ini, yakinlah hal ini akan mereduksi praktik-praktik mafia tanah,” tambahnya.

Pencanangan GNSTA ini diikuti oleh acara berikutnya, yaitu penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN dengan Sekretariat Utama ANRI tentang Pengelolaan Warkah Yuridis dan Buku Tanah, yang turut menghadirkan Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto dengan Kepala ANRI, Imam Gunarto pada 27 Juli 2022 lalu dalam rangka menyinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan kedua lembaga di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, dan kearsipan.

Acara yang berlangsung di Aula Prona Lantai 7 Kementerian ATR/BPN ini melangsungkan serangkaian acara lainnya, yaitu Peresmian (*Launching*) Model Gedung Arsip Kementerian ATR/BPN dan Fasilitas Sarana Prasarana Pusat, serta pelaksanaan webinar “Peluang dan Kendala Penataan Arsip dalam Memberantas Mafia Tanah”. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Desi Pratiwi pun turut hadir menjadi salah satu pembicara dalam webinar tersebut. (rra)



Seminar “Dharma Samudera Pejuang Wanita Negara Poros Maritim Dunia” diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudera yang diperingati setiap 15 Desember yang diinisiasi oleh ANRI dan PT Pelabuhan Indonesia. (17/01/23).

MENELISIK ARSIP GENDER MELALUI DISKUSI PANEL “KARTINI DAN PERJUANGAN GENDER DI INDONESIA”

Jakarta (17/01) - Melanjutkan rangkaian acara pada “Seminar Nasional Dharma Samudera Pejuang Wanita, Negara Poros Maritim Dunia” yang diselenggarakan di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, gedung C lantai 2, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menyelenggarakan diskusi panel sesi kedua yang bertema “Kartini dan Perjuangan Gender di Indonesia”. Kegiatan ini dipandu Anggota Dewan Pakar Memori Kolektif Bangsa, Asep Kambali dan menghadirkan narasumber Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional, Prof. Erwiza Erman dan Arsiparis Madya ANRI, Nadia F. Dwiandari dengan pembahas Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Prof. Endang Susilowati dan Aktivistis Perempuan Marcella Zalianty, Marcella Zalianty.

Prof. Erwiza menceritakan bahwa Kartini sebagai anak ke-5 dari 11 saudara, berasal dari keluarga priyayi dengan budaya feodal Jawa yang sangat ketat. Dengan kelebihan yang dimiliki, Kartini bisa menikmati pendidikan di ELS. Namun sayangnya mimpi untuk pergi ke Belanda tidak terwujud meskipun sudah diperjuangkan oleh temannya, Estella Zeehandelaar. Munculnya kontradiksi antara

budaya feodal dengan budaya modern yang terjadi pada masa itu, membuat hati Kartini bergejolak. Saat itu, konteks politik etis tentang strategi kebijakan pembangunan khususnya di bidang kesetaraan gender sedang berkembang. Hal ini juga diperkuat dengan perbedaan yang sangat besar antara kehidupan penjajah dan masyarakat yang dijajah. Kartini merasa bahwa lingkungan internal dan eksternal sangat jauh berbeda. Ia pun pada akhirnya memilih untuk berjuang dengan tinta, dengan kata-kata. “Kingdom of the words atau kata-kata adalah kekuatan. Kegelisahan Kartini pun diutarakan ke dalam surat-suratnya dengan menuangkan ide-ide tentang kemajuan, pendidikan, kemandirian, dan ketidakadilan khususnya kepada wanita,” tambah Erwiza.

Surat-surat tersebut oleh JH Abendanon dikumpulkan untuk diterbitkan ke dalam sebuah buku pada tahun 1911 yang kini sangat dikenal yakni Habis Gelap Terbitlah Terang (*Door Duisternis tot Licht*).

Sementara itu, Nadia Fauziah Dwiandari menjabarkan cara kerja ANRI dalam mengidentifikasi arsip gender. Mekanisme kerja yang dilakukan berawal dari persiapan yakni memahami konsep dasar konsep gender, kemudian menyusun panduan penelusuran hingga mengeksplorasi arsip

dan metadata. Tahap ini menghasilkan nama-nama organisasi, tokoh, subjek hingga peristiwa yang melingkupi upaya kesetaraan gender. Beberapa nama tokoh yang muncul selain Kartini sendiri ialah Dewi Sartika, Maria Ulfah, dan SK Trimurti. Selanjutnya, pemanfaatan arsip menjadi publikasi kearsipan yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan dinominasikan ke dalam *Memory of The World (MoW)*. “Joint nomination untuk MoW untuk arsip gender sendiri ANRI bekerja dengan Universitas Leiden/KITLV.

Marcella Zalianty sebagai pembahas menerangkan bahwa sosok pahlawan perempuan setelah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, maka perjuangannya tidak berhenti di situ saja. “Kita sebagai penerus bangsa wajib mendedikasikan kerja keras untuk meneruskan perjuangan mereka. Ia juga mengulas sosok perempuan pahlawan selain Kartini, yakni Keumalahayati yang berasal dari Aceh. Pada masanya Keumalahayati dan perempuan Aceh lainnya berada pada posisi ketika para suami meninggal maka mereka tidak berdaya secara ekonomi. Maka perasaan emansipasi pun bergolak ketika penjajahan Belanda muncul.”

Pembahas selanjutnya yakni Prof. Endang Susilowati menambahkan alasan Kartini begitu dikenal luas karena adanya glorifikasi terhadap Kartini. Namun dalam sudut pandang Kartini, perempuan yang modern bukan yang harus mampu bersaing dengan laki-laki melainkan perempuan yang bisa menjadi mitra sejajar dengan laki-laki, perempuan yang dihormati dan diterima eksistensinya.

Sebagai informasi, Seminar “Dharma Samudera Pejuang Wanita Negara Poros Maritim Dunia” diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudera yang diperingati setiap 15 Desember yang diinisiasi oleh ANRI dan PT Pelabuhan Indonesia. (tr)



Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat Menjelaskan “sebagai poros maritim dunia, rekam jejak pahlawan dan tokoh sejarah juga patut menjadi sebuah pijakan bagi kita untuk menata kembali laut sebagai wilayah strategi NKRI”. (17/01/23).

WAKIL KETUA MPR RI: REKAM JEJAK PAHLAWAN PATUT JADI PIJAKAN MENATA LAUT SEBAGAI WILAYAH STRATEGI NKRI

Jakarta (17/01) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Lestari Moerdijat mengapresiasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang telah menginisiasi diskusi terbuka untuk menyampaikan kepada publik bagaimana Indonesia memiliki perempuan-perempuan hebat dalam poros maritim dunia. Hal ini disampaikan dalam pembukaan seminar nasional “Dharma Samudera Pejuang Wanita Negara Poros Maritim Dunia” yang diselenggarakan oleh ANRI dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) secara daring dan luring di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, ANRI.

Lestari Moerdijat sebagai pembicara kunci menyampaikan, rekam jejak pahlawan perempuan-perempuan di bidang maritim bisa ditelusuri dan beberapa di antaranya mendapat pengakuan sebagai pahlawan atas perjuangannya, seperti

Indonesia mengangkat Laksamana Keumalahayati dan Martina Tiahahu.

“Ada satu tokoh yang saat ini dalam memori kolektif masyarakat lokal dikenal sebagai pejuang, yaitu Ratu Kalinyamat. Saat ini menunggu waktu yang tepat untuk mendapat gelar pahlawan nasional. Kekurangan data primer menjadi salah satu alasan. Ini menjadi salah satu tantangan kita. Kelemahan dalam pengarsipan menjadi tantangan bagi kita untuk bisa menyelamatkan banyak hal, seperti catatan penting yang dapat menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang besar. Dan langkah yang telah dilakukan oleh ANRI adalah sebuah langkah mulia yang harus dilanjutkan,” jelas Lestari Moerdijat.

Arsip memiliki peran yang luar biasa. Sejarah mencatat banyak peran signifikan para perempuan yang menggagas berbagai macam

perubahan dalam zamannya. Kegigihan setiap perempuan dalam mempertahankan wilayah laut hingga saat ini membuktikan bahwa hegemoni laut merupakan sektor vital bagi tumbuh kembangnya sebuah kelompok masyarakat.

“Sebagai poros maritim dunia, rekam jejak pahlawan dan tokoh sejarah juga patut menjadi sebuah pijakan bagi kita untuk menata kembali laut sebagai wilayah strategi NKRI,” ujar Lestari Moerdijat.

Seminar ini digelar sebagai sebuah upaya untuk diseminasi program penyelamatan arsip kemaritiman dan arsip gender, serta meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penyelamatan dan pelestarian arsip kemaritiman dan arsip gender sebagai Memori Kolektif Bangsa dan pemajuan budaya bangsa Indonesia. **(sa)**

Jakarta, 27 Januari 2023

FOTO: DOK. ANRI



Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih (kiri) dan Kepala ANRI, Imam Gunarto (kanan) menunjukkan nota kesepahaman antara ANRI dan Ombudsman RI tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan Nasional dan Pengelolaan Arsip di Lingkungan Ombudsman RI. (27/01/23).

KEPALA ANRI DAN KETUA OMBUDSMAN RI SEPAKATI NOTA KESEPAHAMAN

Jakarta (27/01) - Sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan kearsipan nasional dan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Ombudsman RI, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto dan Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan Nasional dan Pengelolaan Arsip di Lingkungan Ombudsman RI. Penandatanganan dilaksanakan di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, Gedung C, lantai 2 ANRI.

Pada sambutannya, Imam Gunarto menyampaikan bahwa kolaborasi ANRI dan Ombudsman RI

serta keberadaan kantor perwakilan Ombudsman RI di daerah diharapkan dapat memberikan penguatan kearsipan di instansi pusat dan daerah. Ditambahkan olehnya, arsip memiliki keterkaitan erat dengan proses akuntabilitas dalam birokrasi yang di dalamnya juga turut menjamin penyelenggaraan layanan publik yang cepat, objektif dan transparan. "Kami pun turut mengapresiasi upaya Ombudsman RI untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsipnya yang terlihat dari capaian nilai hasil pengawasan kearsipan yang terus meningkat dari waktu ke waktu," jelas Imam.

Lebih lanjut Mokhammad Najih menyampaikan arsip merupakan bagian penting sejarah perjalanan

bangsa Indonesia. "Jangan sampai kita melupakan sejarah bangsa," jelasnya. Pada kesempatan ini, Mokhammad Najih juga menyampaikan bahwa ada beberapa kasus yang berpotensi terjadinya maladministrasi yang salah satunya diakibatkan karena kurangnya pengelolaan arsip yang baik pada penyelenggara layanan publik. Oleh karenanya instansi pemerintah perlu melakukan perbaikan tata kelola kearsipan/dokumennya untuk mencegah maladministrasi tersebut.

Pada kegiatan ini, selain penandatanganan nota kesepahaman, Ketua Ombudsman RI dan jajaran juga turut mengunjungi tempat penyimpanan (depot) arsip statis. **(tk)**



Pelaksanaan Rapat Koordinasi diharapkan dapat disepakati bersama tata cara penataan arsip bagi Kementerian / Lembaga yang baik dan terprogram menuju Ibu Kota Nusantara. (07/02/23).

MENUJU IBU KOTA NUSANTARA, ANRI SELENGGARAKAN RAPAT KOORDINASI PENATAAN ARSIP KEMENTERIAN/LEMBAGA

Jakarta (07/02) - Direktorat Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penataan Arsip Kementerian/ Lembaga (K/L) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Ballroom Magzie, Hotel Grandkemang, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri peserta sebanyak 190 orang dari perwakilan 68 kementerian/lembaga.

Pada sambutannya, Kepala ANRI Imam Gunarto menyampaikan bahwa ANRI bersama K/L yang akan pindah ke IKN harus menyamakan hati dan pikiran, gerak langkah dan aksi dalam membangun kearsipan, khususnya menuju IKN. Pekerjaan besar dan kolosal ini melibatkan banyak K/L yang akan pindah, sehingga menjadi momen bersejarah yang akan dikenang anak cucu kita. "Proses ini harus dilaksanakan secara kolaboratif, tidak hanya ANRI dengan K/L saja tetapi dengan swasta, perguruan tinggi, dan komunitas bersama-sama bersinergi," terang Imam Gunarto.

Lebih lanjut Imam menambahkan, tugas kita bersama adalah menata dan mendigitalisasi arsip dari 70 K/L yang akan

pindah ke IKN dan menjamin arsip arsip statis, terjaga, vital dapat terselamatkan. Kemudian menjamin arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak bernilai guna kelanjutan dimusnahkan sesuai prosedur. Ini tak lain untuk menjamin arsip, menjaga keberlanjutan administrasi kementerian/lembaga di IKN. "Momen perpindahan menuju IKN ini dapat menjadi momen tertib arsip, transformasi digital dan penyelamatan Memori Kolektif Bangsa (MKB) yang efektif," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Prof. Mohammed Ali Berawi yang hadir sebagai pembicara utama menyampaikan bahwa kita harus mampu untuk menjadi lebih adaptif, produktif, dan kompetitif. Indeks kompetitif manusia Indonesia saat ini mencapai ranking 42 dari semua negara. Salah satu indikator efisiensi pemerintahan, bagaimana *decision making* dilakukan dengan cepat. Maka harapan ke depan adalah sistem Srikandi yang semakin baik. "Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk ke dalam lima besar negara dengan

kekuatan ekonomi dunia. Maka dari itu, perlu disiapkan Nusantara sebagai Kota Cerdas melalui *e-government*, transportasi dan mobilitas, pembangunan sistem untuk hidup, sumber daya alam dan energi, sumber daya manusia (SDM) dan industri, serta pembangunan lingkungan dan infrastruktur," terangnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI, Desi Pratiwi menyampaikan bahwa sampai dengan Januari 2023, terdapat 68 K/L, 105 kabupaten dan 93 kota yang menerapkan Srikandi, sehingga diharapkan pada akhir tahun 2023 semuanya sudah terhubung. ANRI akan lebih fokus pada percepatan penataan dan digitalisasi arsip. Perpindahan ke ibu kota adalah pengalaman baru maka harus benar-benar bisa mengidentifikasi arsip mana saja yang akan digunakan di IKN. Semua arsip tersebut akan dikelola di dalam Srikandi, termasuk salah satunya arsip terjaga. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, dapat disepakati bersama tata cara penataan arsip bagi K/L yang baik dan terprogram menuju IKN.

Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Priyanto Rohmatullah juga mengemukakan bahwa penataan arsip harus dibungkus dalam kerangka Srikandi. Peran ANRI di antaranya melakukan pendataan dan penataan arsip, penerapan Srikandi, penyusutan arsip, peningkatan kompetensi digital SDM Arsiparis, dan advokasi pembinaan kepada K/L yang dipindahkan ke IKN.

Melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat disepakati bersama tata cara penataan arsip bagi K/L yang baik dan terprogram menuju IKN. (tr)



FOTO: DOK. ANRI

Diskusi berjalan selama satu jam dan diakhiri dengan foto bersama anggota Delegasi dan PPI Leiden. Diskusi ini pun dilaksanakan sebagai bagian dari agenda kunjungan kerja Delegasi ANRI ke Belanda. (14/03/23).

ANRI DAN UNIVERSITAS LEIDEN SEPAKATI PROGRAM EKSEKUTIF DAN PENOMINASIAN ARSIP KARTINI SERTA PERJUANGAN KESETARAAN GENDER INDONESIA SEBAGAI MOW

Leiden (14/03) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Universitas Leiden Belanda menyepakati program eksekutif yang ditandai dengan penandatanganan program eksekutif oleh Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani dan Direktur Perpustakaan Universitas Leiden, Kurt de Belder. Hadir dalam penandatanganan ini Kepala ANRI, Imam Gunarto, Duta Arsip sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rieke Diah Pitaloka dan Penasihat Ahli ANRI bidang arsip kemaritiman, Connie Rahakundini Bakrie serta anggota delegasi ANRI lainnya.

Pada sambutannya, Imam menyampaikan bahwa kerja sama ini berkontribusi dalam kegiatan preservasi, akses koleksi dan arsip yang dimiliki kedua lembaga serta peningkatan kapasitas sumber daya

manusia khususnya bagi Arsiparis di Indonesia. Dalam kesempatan ini, delegasi ANRI pun melaksanakan pembahasan tentang penominasian arsip Kartini dan perjuangan kesetaraan gender di Indonesia.

Menurut Rieke, Kartini sebagai tokoh perempuan Indonesia telah

menginspirasi kaum wanita di Indonesia dan bahkan dunia sejak dahulu hingga saat ini. Penominasian bersama arsip Kartini ini dilakukan tidak hanya dengan Universitas Leiden Belanda, tetapi juga dengan Arsip Nasional Belanda yang juga memiliki arsip tersebut. **(agp/ts)**





FOTO: DOK. ANRI

Kerja sama ANRI dan NAN diproyeksikan akan melakukan pertukaran kepakaran dalam rangka penggunaan protokol International Image Interoperability Framework (IIIF) untuk menyajikan arsip dan metadata kedua lembaga secara daring. (14/03/23).

ANRI DAN NAN PERKUAT KERJA SAMA KEARSIPAN

Amsterdam (14/03) - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto dan Direktur National Archives of the Netherlands (NAN), Afelonne Doek menandatangani Program Eksekutif kerja sama kearsipan Indonesia – Belanda periode 2023 – 2026. Program Eksekutif ini merupakan turunan dari Memorandum Saling Pengertian kedua lembaga yang ditandatangani sebelumnya pada Oktober 2022 di Jakarta. Pada acara penandatanganan ini dihadiri pula oleh Duta Arsip sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rieke Diah Pitaloka dan Penasihat

Ahli ANRI bidang arsip kemaritiman, Connie Rahakundini Bakrie serta anggota delegasi ANRI.

Kepala ANRI menyampaikan bahwa melalui kerja sama ini kedua lembaga akan meningkatkan khazanah arsip keduanya melalui pertukaran hasil alih media arsip periode VOC dan Kolonial Hindia – Belanda. ANRI dan NAN juga akan melakukan penominasian bersama arsip warisan dokumenter yang dimiliki dalam daftar Memori Dunia UNESCO serta mengadakan pameran arsip tentang sejarah bersama, warisan, dan hubungan budaya yang diadakan di

kedua negara.

Di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ANRI akan mengikuti lokakarya dan pelatihan yang diselenggarakan oleh NAN dalam bentuk lokakarya dan pelatihan musim panas atau musim dingin di Belanda. Melalui kerja sama ini, keduanya juga diproyeksikan akan melakukan pertukaran kepakaran dalam rangka penggunaan protokol International Image Interoperability Framework (IIIF) untuk menyajikan arsip dan metadata kedua lembaga secara daring. **(agp/ts)**



ANRI bekerja sama dengan UNESCO Jakarta menyelenggarakan Talkshow dan Lomba Desain Poster “Meningkatkan Kesadaran Warisan Dokumenter bagi Aktivis dan Pakar Kebudayaan” di Museum KAA, Bandung. (20/03/23).

HUT KE-30 MOW, ANRI DAN UNESCO JAKARTA SELENGGARAKAN TALKSHOW DAN LOMBA DESAIN POSTER PENINGKATAN KESADARAN WARISAN BUDAYA DOKUMENTER

Bandung (20/03) - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-30 *Memory of the World* (MoW) dan HUT ke-68 Konferensi Asia Afrika (KAA), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selaku Komite Nasional MoW bekerja sama dengan UNESCO Jakarta menyelenggarakan *Talkshow* dan Lomba Desain Poster “Meningkatkan Kesadaran Warisan Dokumenter bagi Aktivis dan Pakar Kebudayaan” di Museum KAA, Bandung. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Museum KAA juga turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Turut hadir Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Itje Chodidjah dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat, Hening Widiatmoko mewakili Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil.

Saat membuka acara, Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan bahwa acara ini merupakan kerja sama yang baik antara UNESCO Jakarta dengan ANRI selaku Komite Nasional MoW. Tak hanya itu turut terlibat bekerja sama pula Museum KAA dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Imam Gunarto juga memaparkan rencana penominasian

warisan dokumenter Indonesia menjadi MoW pada 2023, yakni penominasian MoW dan *Memory of the World Committee for Asia and the Pacific* (MoWCAP).

Penominasian MoW tersebut di antaranya Arsip Kartini dan Perjuangan Gender Indonesia (Indonesia dan Belanda), Arsip Jalur Rempah (Indonesia, Belanda, Portugal, Malaysia, Tiongkok), Syair-syair Hamzah Fansuri (Indonesia, Belanda), Naskah Sanghyanh Siksa Kandang Karesian, Tambo Tuanku Imam Bonjol, Arsip dan Naskah Syekh Yusuf Makassar (Indonesia, Sri Lanka, Afrika Selatan). Adapun penominasian MoWCAP yakni Arsip Pembentukan ASEAN (Negara ASEAN, SARBICA, dan Sekretariat ASEAN).

Sebelum sesi *talkshow*, Pakar Desain Grafis Institut Teknologi Bandung, A.M. Mahdar mengumumkan pemenang lomba desain poster “Program Memori Dunia UNESCO dari Indonesia”. Juara I, II, III lomba desain poster secara berturut-turut ialah Mukhammad Fahmi Idris dari Kampus 2 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

Kuningan Kota Cirebon dengan karya “Maskapai Dagang Hindia Timur”, Muhamad Akhmal Fryandi dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan karya “Aku Cinta Indonesia MERDEKA”, dan Pripti Nur Kholifah dari Universitas Al-Ghafari dengan karya “Making History Cool Again”.

Adapun narasumber yang mengisi sesi *talkshow*, di antaranya Programme Specialist UNESCO Jakarta, Ana Lomtadze yang menyampaikan materi Berkenalan dengan Memori Dunia; Ketua Dewan Pakar Komite Nasional MoW Indonesia, Muchlis PaEni dengan materi Khazanah MoW dan Manfaatnya bagi Ilmu Pengetahuan dan Kemanusiaan; Kepala Museum KAA, Dahlia Kusuma Dewi yang dengan materi tentang Akses Universal pada Warisan Dokumenter: Studi Kasus Arsip Konferensi KAA; serta Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, Kandar yang menyampaikan materi tentang Pelestarian Warisan Dokumenter: Tantangan dan Peluang. Sebagai informasi, acara dapat kembali disaksikan pada kanal Youtube Arsip Nasional RI melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=F9uBy_kVnx0. (sa)



Sebagai Lembaga Negara, Kemenperin telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Tercatat Kemenperin telah melaksanakan penyerahan arsip statis sebanyak 8 kali pada 2004, 2007, 2017, 2019, 2020, 2021, dan 2022. (21/03/23).

KEMENPERIN SERAHKAN ARSIP STATIS, ARSIP PENANGANAN COVID-19, DAN SALINAN AUTENTIK ARSIP TERJAGA

Jakarta (21/03) - Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) menyerahkan arsip statis, arsip penanganan Covid-19, dan salinan autentik arsip terjaga kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penyerahan arsip dilaksanakan secara simbolis oleh Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo dan diterima langsung oleh Kepala ANRI, Imam Gunarto di Ruang Garuda, Kemenperin, Jakarta Selatan.

Pada sambutannya, Imam Gunarto menyampaikan terima kasih atas keseriusan dan komitmen Kemenperin terhadap dunia kearsipan. Arsip yang diserahkan merupakan memori yang sangat penting bagi generasi mendatang karena menggambarkan sejarah bangsa sekaligus merupakan arsip negara yang berkaitan erat dengan keberadaan dan keberlangsungan hidup berbangsa

dan bernegara. Hal tersebut diamini Dody Widodo, melalui sambutannya, Dody menyampaikan tanpa arsip bangsa ini tidak bisa maju. Arsip bernilai guna bagi bangsa dan negara, jika arsip tidak terjaga dikhawatirkan akar permasalahan kita sebagai bangsa tidak jelas diketahui. Dalam menjaga hal tersebut, Dody berjanji untuk terus berupaya meningkatkan kinerja kearsipan di lingkungan Kemenperin salah satunya melalui kegiatan penyerahan arsip statis.

Sebagai Lembaga Negara, Kemenperin telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Tercatat Kemenperin telah melaksanakan penyerahan arsip statis sebanyak 8 kali pada 2004, 2007, 2017, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Sedangkan penyerahan arsip statis

penanganan Covid-19 dan penyerahan salinan autentik arsip terjaga masing-masing merupakan penyerahan arsip yang pertama kalinya bagi Kemenperin.

Pada penyerahan kali ini, arsip yang diserahkan berupa 55 sampul arsip statis kurun waktu 2013-2015, 17 lembar dan 8 sampul arsip tekstual dan 14 arsip foto digital (dalam 1 USB/flashdisk) arsip statis penanganan Covid-19 kurun waktu tahun 2020-2021 dan 5 nomor arsip (3 berkas, 13 lembar) salinan autentik arsip terjaga kurun waktu tahun 2018, 2019, dan 2021.

Melalui kegiatan penyerahan arsip statis tersebut, ANRI optimis bahwa penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kemenperin akan semakin tertib, semakin baik dan semakin maju karena kesadaran seluruh pejabat dan pegawai Kemenperin terhadap arti penting arsip semakin meningkat. **(tk/pi/ra)**



FOTO: DOK. ANRI



Program MKB adalah program registrasi arsip sebagai warisan dokumenter yang diampu oleh ANRI sebagai bagian dari program registrasi warisan dokumenter (Memory of the World) UNESCO dengan kriteria spesifik yang harus dipenuhi oleh pengusul agar dapat dimasukkan ke dalam register MKB. (06/04/23).

PENOMINASIAN ARSIP SEBAGAI MKB: 12 ARSIP DIUSULKAN SEBAGAI WARISAN DOKUMENTER

Jakarta (06/04) - Sebagai tindak lanjut hasil Sidang Dewan Pakar Memori Kolektif Bangsa (MKB) pada 30 Maret 2023, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Presentasi Nominasi dalam Program Penominasian Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa Tahun 2023 di Hotel RA Suites Simatupang, Jakarta (06/04). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala ANRI, Imam Gunarto dan Ketua Komite MKB, Kandar. Turut hadir pula sebagai undangan, Ketua Dewan Pakar Komite MKB Mukhlis PaEni beserta anggota, di antaranya M. Taufik, Prof. Singgih Tri Sulistiyono, Adrianus LG Waworuntu, Sri Sumekar dan Asep Kambali.

Dalam arahannya, Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan

bahwa ANRI selaku instansi yang bertanggung jawab dalam program registrasi arsip sebagai MKB telah melaksanakan sosialisasi peraturan terkait dengan hal tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat luas tidak hanya di lingkungan para pemangku kepentingan, tetapi juga organisasi masyarakat di seluruh Indonesia.

Program MKB adalah program registrasi arsip sebagai warisan dokumenter yang diampu oleh ANRI sebagai bagian dari program registrasi warisan dokumenter (*Memory of the World*) UNESCO dengan kriteria spesifik yang harus dipenuhi oleh pengusul agar dapat dimasukkan ke dalam register MKB.

“Nah, kriteria ini mencakup apa

saja? Ada signifikansi budaya, ada sejarah, sosial dari warisan dokumenter, ada juga keaslian, integritas, dan kelangkaannya. Program ini juga memberikan panduan dan dukungan kepada lembaga atau individu untuk melestarikan dan menyediakan akses ke warisan dokumenter mereka,” terang Imam Gunarto.

Adapun beberapa arsip yang dinominasikan sebagai arsip MKB, di antaranya:

1. Nasionalisasi Pabrik Semen Pertama di Indonesia 1907-1972;
2. Arsip Studiefonds Mangkunegaran;
3. Arsip Kesenian Tari Khas Mangkunegaran;
4. Arsip-arsip Pembangunan Infrastruktur pada Masa Kolonial (1874-1929);
5. Arsip PT Garam Periode 1924-1961;
6. Arsip Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Periode 1893-1982;
7. Arsip Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia 1946-1949;
8. Arsip Pembangunan Patung Dewi Saraswati di Washington DC;
9. Manusia Laut Suku Sama Bajau (Dalam Cerita Manusia Perahu Terakhir);
10. Arsip Radio Rimba Raya;
11. Arsip Belitong Unesco Global Geopark;
12. Percikan Semangat Juang Arek Suroboyo di Hotel Majapahit.

Kegiatan ini diselenggarakan secara *hybrid* dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada 12 nominator register MKB untuk memberikan gambaran secara visual dan faktual, terkait dengan kandungan informasi dan signifikansi sejarah yang terkandung dalam khazanah arsip yang dinominasikan kepada para anggota Dewan Pakar MKB. **(tr)**



Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas (tengah) didampingi Kepala ANRI, Imam Gunarto (kiri) dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani (kanan) saat membuka Rakornas Kearsipan Tahun 2023. (22/04/23).

MENTERI PANRB MEMBUKA RAKORNAS KEARSIPAN TAHUN 2023

Banyuwangi (22/05) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas hadir membuka dan memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kearsipan Tahun 2023 dalam rangka Hari Kearsipan ke-52 Tahun 2023 di Blambangan Ballroom, Hotel El-Royal, Banyuwangi, Jawa Timur (22/5).

Dalam arahannya pada Rakornas Kearsipan Tahun 2023, Abdullah Azwar Anas menyampaikan dan menekankan arahan Presiden Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi. "Kita harus bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak," ujar Menteri PANRB. "Kemudian, yang kedua, birokrasi ini bukan tumpukan kertas, dan yang ketiga birokrasi ini harus lincah dan cepat," tambahnya.

Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, menurut Abdullah Azwar Anas perlu diadakannya strategi dan cara untuk melipat gandakan capaian, tidak mungkin tanpa digitalisasi dan harus menentukan skala prioritas.

"Birokrasi ini engine," ujar Menteri PANRB. "Maka, kalau pelayanan negara ingin bagus, birokrasinya mesti kita perbaiki bersama-sama dan itu adalah tugas kita bersama."

Arahan yang diberikan pada acara Rakornas Kearsipan Tahun 2023 ini menerjemahkan arahan Presiden Joko Widodo terkait Program Prioritas Kementerian PANRB, antara lain pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, penerapan reformasi birokrasi tematik, transformasi profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis digital, akselerasi pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP digital di seluruh Indonesia, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan, tata Kelola, dan ASN menuju IKN Nusantara dan DOB Papua, serta transformasi sistem Pendidikan ASN mendukung percepatan reformasi birokrasi tematik.

"Terkait dengan kearsipan, kami yakin dengan langkah yang disampaikan oleh

teman-teman ANRI, Kementerian/Lembaga sekarang melangkah tidak lagi dengan manual, tapi dengan digital. Sehingga Memori Kolektif Bangsa tentu akan terawat dengan baik dan saya yakin ke depan anak-anak, cucu kita akan bisa mendapatkan ini dengan baik di masa mendatang," jelas Menteri PANRB.

Abdullah Azwar Anas turut mengapresiasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Ia mengungkapkan bahwa migrasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar segera dijemput dan pada tahun 2024 semua harus sudah diintegrasikan.

Dalam akhir arahannya, Menteri PANRB memberikan ucapan selamat kepada ANRI dan Banyuwangi atas terselenggaranya acara Rakornas Kearsipan Tahun 2023 dalam rangka memperingati Hari Kearsipan ke-52 Tahun 2023, serta melakukan peresmian pembukaan secara simbolis acara Rakornas Kearsipan Tahun 2023 didampingi Kepala ANRI, Imam Gunarto serta Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. (rra)



Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas (kiri) didampingi Kepala ANRI, Imam Gunarto (kanan) memberikan penghargaan sebagai Tokoh Kepemimpinan Kearsipan dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (tengah). (22/04/23).

ANRI BERIKAN PENGHARGAAN TOKOH KEPEMIMPINAN KEARSIPAN KEPADA GUBERNUR JAWA TIMUR

Banyuwangi (22/05) - Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kearsipan ke-52 yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerima seluruh peserta Anugerah Kearsipan 2023 untuk hadir pada acara welcoming dinner di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Senin (22/5). Pada acara ini, ANRI memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sebagai Tokoh Kepemimpinan Kearsipan dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa.

Dalam sambutannya, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto mengucapkan terima kasih atas undangan dan telah bekerja sama dengan ANRI untuk

penyelenggaraan acara dalam rangka peringatan Hari Kearsipan ke-52. Pada acara ini turut hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, serta Pakar Militer dan Pertahanan, Connie R. Bakrie.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih atas keseksamaan dalam meningkatkan kearsipan dan dapat menikmati indahnya Jawa Timur. Semangat positif kearsipan juga disampaikan oleh Pakar Militer dan Pertahanan, Connie R. Bakrie. Menurutnya, kekuatan arsip itu penting dan arsip bisa menjadi senjata, serta mengajak untuk terus semangat dalam memelihara arsip.

“Berbagai kalangan harus banyak untuk memiliki perhatian terhadap

arsip. Arsip dapat menjadi senjata. Apalagi kawasan perbatasan mulai sedang tidak baik-baik saja, tapi arsip-lah yang dapat membunyikan sejarah bahwa papua bagian dari NKRI, karena itu adalah salah satu senjata kita,” jelas Connie R. Bakrie.

Peringatan Hari Kearsipan ke-52 diselenggarakan dengan mengusung tema “Gerakan Kearsipan: Menuju Birokrasi Maju, Memori Kolektif Bangsa, dan Peradaban Unggul”. Peringatan ini diharapkan menjadi momentum penguatan kembali seluruh entitas kearsipan untuk berkolaborasi agar penyelenggaraan kearsipan secara nasional semakin berkualitas, sehingga mendorong pemanfaatan bidang kearsipan bagi masyarakat Indonesia sebagai memori kolektif dan informasi jati diri bangsa. **(sa)**



Imam Gunarto juga menyampaikan maksud dan tujuan penyelenggaraan Hari Kearsipan ke-52 yakni dapat mengambil marwah perjuangan kearsipan yang dilakukan oleh para pendahulu dan kemudian meneladaninya. (22/04/23).

KEPALA ANRI: PERINGATAN HARI KEARSIPAN KE-52 MOMENTUM DORONG REFORMASI BIROKRASI DAN PEMAJUAN BUDAYA

Banyuwangi (22/05) - Puncak peringatan Hari Kearsipan ke-52 pada tahun 2023 dilaksanakan di Hotel El Royale, Banyuwangi dengan mengangkat tema “Gerakan Kearsipan Menuju Birokrasi Maju, Memori Kolektif Bangsa dan Peradaban Unggul”. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto dalam laporan pembukaan puncak acara tersebut menyampaikan bahwa tema tersebut sejalan dengan program nasional, di mana program kearsipan memiliki dua impact, yaitu mendorong percepatan reformasi birokrasi yang maju, dan mendorong pemaian kebudayaan melalui terbentuknya memori kolektif bangsa dan peradaban yang unggul.

“Bangsa kita terkenal sebagai bangsa pelupa, satu-satunya jalan untuk mengatasinya adalah

dengan membangun kearsipan sebagai pusat memori kolektif bangsa. Banyak masyarakat yang tercerabut dari memori desa dan daerahnya, tercerabut dari memori kebangsaannya. Banyak anak-anak bangsa yang hidup di Indonesia, tetapi memorinya berbeda dan bukan Indonesia. Jika ini kita biarkan, maka bangsa kita akan mengalami kekeroposan dari dalam. Saya sangat yakin bahwa gerakan kearsipan untuk mengembalikan dan menjaga memori kolektif bangsa adalah peperangan sesungguhnya, kita hari ini,” papar Imam Gunarto.

Pada kesempatan yang sama, Imam Gunarto juga menyampaikan maksud dan tujuan penyelenggaraan Hari Kearsipan ke-52 yakni dapat mengambil marwah perjuangan kearsipan yang dilakukan oleh

para pendahulu dan kemudian meneladaninya. Komunitas kearsipan diharapkan dapat meneguhkan dan memperkokoh kembali niat untuk menyelenggarakan kearsipan yang lebih baik dalam mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Sebagai informasi, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur terpilih sebagai hasil kesepakatan para Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi se-Indonesia pada peringatan Hari Kearsipan ke-51 di Pekanbaru, Riau. Peringatan Hari Kearsipan ke-52 tahun 2023 ini juga dilaksanakan tidak terlepas dari tujuan untuk meningkatkan sinergi seluruh pemangku kepentingan Bidang Kearsipan di tingkat kementerian/lembaga/daerah/BUMN/PTN untuk melaksanakan tertib arsip, transformasi digital kearsipan, dan memori kolektif bangsa. (tk)



Ipuk Fiestiandani menyampaikan pentingnya tata kelola kearsipan yang efektif dan efisien dapat menjadikan data-data di pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terintegrasi. (22/04/23).

BUPATI BANYUWANGI: TERIMA KASIH ATAS PENYELENGGARAAN PUNCAK PERAYAAN HARI KEARSIPAN KE-52 DI KABUPATEN BANYUWANGI

Banyuwangi (22/05) - Peringatan Hari Kearsipan ke-52 tahun 2023 diselenggarakan di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur dipilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Kearsipan ke-52 berdasarkan hasil Executive Board Meeting peringatan Hari Kearsipan ke-51 di Provinsi Riau.

Dalam peringatan Hari Kearsipan ke-52, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas mengucapkan terima kasih kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang telah memilih Kabupaten Banyuwangi sebagai tuan rumah penyelenggaraan puncak perayaan Hari Kearsipan ke-52.

“Kami mengucapkan selamat datang di Kabupaten Banyuwangi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ANRI yang telah memilih Kabupaten

Banyuwangi untuk penyelenggaraan Hari Kearsipan ke-52. Kedatangan Bapak/Ibu menjadi salah satu kontribusi dalam pemulihan ekonomi di Banyuwangi,” ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas.

Ipuk Fiestiandani menyampaikan pentingnya tata kelola kearsipan yang efektif dan efisien dapat menjadikan data-data di pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terintegrasi. Tata kelola arsip ini juga akan berdampak positif pada unit kerja, termasuk hasil pengawasan kearsipan. Sebagai informasi, berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022 Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan nilai pengawasan kearsipan.

“Peningkatan nilai hasil pengawasan kearsipan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang sebelumnya pada

tahun 2021 mendapatkan nilai 37,5 dan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022 menjadi 68,8. Ini berkat komitmen seluruh SKPD yang meningkat,” jelas Ipuk Fiestiandani. Banyuwangi terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola kearsipan. Beberapa di antaranya adalah menerapkan Aplikasi SRIKANDI serta pendampingan tenaga kearsipan di unit kerja masing-masing.

Dalam acara puncak peringatan Hari Kearsipan ke-52 ini, turut hadir Kepala ANRI, Imam Gunarto, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, Pimpinan Unit Kearsipan pada Kementerian/Lembaga, Pimpinan Lembaga Kearsipan Provinsi, Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/ Kota, Perwakilan Pimpinan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri, serta Perwakilan Pimpinan Unit Kearsipan BUMN. (sa)



Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro (kiri) secara simbolis menyerahkan arsip statis Komnas HAM kepada Kepala ANRI, Imam Gunarto (kanan) di kantor Komnas HAM. (07/06/23).

HUT KE-30, KOMNAS HAM SERAHKAN ARSIP STATISNYA KE ANRI

Jakarta (07/06) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerahkan arsip statisnya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bertepatan dengan peringatan 30 tahun Komnas HAM. Pada kesempatan ini, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro menyerahkan arsip statis tersebut kepada Kepala ANRI, Imam Gunarto di kantor Komnas HAM. Serah terima arsip statis Komnas HAM dilaksanakan dalam rangkaian acara peringatan 30 Tahun Komnas HAM. Setelah kegiatan serah terima arsip statis, dilanjutkan penandatanganan nota kesepahaman bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ANRI dengan Komnas HAM dan pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di lingkungan Komnas HAM.

“Terima kasih dan penghargaan yang tinggi, karena ada tiga momen kearsipan dilaksanakan dalam perayaan ulang Komnas HAM yang ke 30, yaitu MoU/PKS, Penyerahan arsip statis, dan GNSTA. Tiga kegiatan yang menunjukkan proses transformasi Komnas HAM berjalan sangat hebat selama 30 tahun”, ujar Imam Gunarto.

Imam menambahkan bahwa penyerahan arsip statis Komnas HAM ini merupakan ketiga kalinya, sebelumnya pada tahun 2022 telah dua kali menyerahkan arsip statis ke ANRI. Arsip yang diserahkan tersebut merupakan bagian dari memori kolektif bangsa, yang nantinya akan menjadi bahan pembelajaran masyarakat.

Imam mengungkapkan bahwa pencanangan GNSTA sebagai bentuk komitmen bahwa perjuangan

pemajuan dan penegakan HAM harus terdokumentasi dalam arsip yang baik, dengan tata Kelola yang standar, sehingga kualitas arsip yang merekam aktivitas pemajuan dan penegakan HAM bersifat handal, baik untuk kepentingan administrasi, akuntabilitas, maupun membangun memori kolektif bangsa di bidang HAM.

Sementara itu, Atnike Nova Sigiro mengungkapkan rasa bersyukurnya pada peringatan 30 Tahun Komnas HAM. “Komnas HAM pada usianya yang ke-30 adalah bukti bahwa Lembaga ini telah bertahan menghadapi perubahan sosial, ekonomi, politik di Indonesia maupun di tingkat global,” ungkapnya dalam sambutan. **(is)**



Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan saat mengunjungi ruang Restorasi Arsip ANRI. (12/06/23).

MENKOMARVES, LUHUT BINSAR PANDJAITAN: K/L/D HARUS PARTISIPASI DAN DUKUNG ANRI SELAMATKAN ARSIP KEMARITIMAN

Jakarta (12/06) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa betapa penting melakukan pengarsipan. “Dari hasil kunjungan tadi di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), saya melihat banyak data dari zaman Belanda dibanding zaman Republik. Arsip pada abad ke-16 masih dipelihara, tinggal kita bagaimana turut menambahnya dari kemaritiman,” papar Luhut saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelamatan Arsip Kemaritiman yang diselenggarakan ANRI secara daring dan luring di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, Gedung C lantai 2 ANRI.

Ditambahkan olehnya, di antara negara-negara G20, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup baik dari

sisi ekonominya. Banyak juga keberhasilan lain yang dicapai Indonesia saat ini, seperti hilirisasi, penanganan Covid-19 yang sudah seharusnya menjadi kebanggaan bersama dan direkam dalam arsip kita. “Arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa, memori kolektif bangsa yang harus dikelola dan diselamatkan demi kepentingan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Termasuk juga perjanjian batas maritim, batas-batas negara perlu didokumentasikan dengan baik, harus dipegang betul,” tegas Luhut.

Menutup sambutannya, Luhut kembali menegaskan bahwa arsip adalah *something* yang harus dipelihara. Selain yang sudah terjadi pada masa lalu, kebijakan kemaritiman pada era Presiden Joko Widodo juga penting dilaksanakan.

“Mari dukung dan berpartisipasi aktif bagi kementerian/lembaga dan daerah melalui Kementerian Dalam Negeri, untuk mendukung ANRI menyelamatkan arsip kemaritiman. Ke depan, ANRI juga diharapkan dapat memberikan bahan informasi kearsipan sejarah kemaritiman bangsa Indonesia,” ucapnya.

Sebagai informasi, sebelum membuka Rakor Penyelamatan Arsip Kemaritiman, Luhut beserta jajaran terlebih dahulu melaksanakan kunjungan ke Depot Arsip Konvensional dan Arsip Proklamasi, Laboratorium Kearsipan, dan Ruang Restorasi Arsip ANRI. Luhut juga memberikan apresiasi terhadap yang telah dilaksanakan ANRI dalam merawat arsip bangsa. (tk)



FOTO: DOK. ANRI

Rapat Koordinasi Temu Jaringan SIKN dan JIKN dihadiri sekitar 217 peserta yang merupakan anggota Simpul Jaringan dari seluruh Indonesia, berasal dari berbagai lembaga kearsipan provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga, Perguruan Tinggi Negeri, dan BUMN. (21/06/23).

SIMPUL JARINGAN SE-INDONESIA IKUTI RAKOR TEMU JARINGAN NASIONAL TAHUN 2023

Yogyakarta (21/06) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melakukan koordinasi nasional dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Temu Jaringan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tahun 2023 dengan tema “Akses Arsip Warisan Budaya Nusantara dalam Memperkokoh Jati Diri Bangsa melalui SIKN dan JIKN” sebagai bentuk pelaksanaan tugas sebagai Pusat Jaringan Nasional, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), pada 21 s.d. 23 Juni 2023.

Rapat Koordinasi Temu Jaringan SIKN dan JIKN yang diselenggarakan di Hotel Sahid Raya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta ini dihadiri sekitar 217 peserta yang merupakan anggota Simpul Jaringan dari seluruh Indonesia,

berasal dari berbagai lembaga kearsipan provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga, Perguruan Tinggi Negeri, dan BUMN.

“Tujuan diadakan Rapat Koordinasi Temu Jaringan 2023, sebagai forum koordinasi nasional antara ANRI sebagai pusat jaringan nasional dengan simpul jaringan. Sampai saat ini telah diberikan persetujuan oleh Arsip Nasional RI sebanyak 407 simpul,” terang Deputy Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Andi Kasman dalam mengawali laporan kegiatannya.

Acara yang diselenggarakan secara luring ini selanjutnya dibuka Kepala ANRI, Imam Gunarto. Pada sambutannya, Imam menyampaikan bahwa arsip memiliki fungsi sebagai memori kolektif identitas dan jati diri bangsa. “Undang-undang mengamanatkan agar dikelola

oleh negara, diselamatkan oleh negara. vArsip itu dikelola oleh negara melalui sebuah jaringan melalui SIKN dan JIKN,” papar Imam Gunarto.

Pada kesempatan yang sama hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sekretaris Daerah Provinsi, Beny Suharsono. Menurutnya, acara Rapat Temu Jaringan Nasional ini, menjadi sangat penting sebagai forum untuk meningkatkan kerja sama, perukaran pengetahuan, dan berdiskusi strategi terbaik dalam pengelolaan arsip yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Ketua Dewan Pakar Memori Kolektif Bangsa, Mukhlis PaEni turut hadir menyampaikan sambutan kuncinya terkait kearsipan dimulai dari zaman kerajaan, surat-surat formal antara kerajaan lokal Nusantara merupakan cikal bakal arsip kerajaan Nusantara.

Sebagai penghubung rangkaian acara pada hari pertama (29/6), Penasihat Ahli ANRI Bidang Pertahanan dan Kemaritiman, Connie Rahakundini Bakrie juga menyampaikan bagaimana peranan arsip dalam pertahanan keamanan negara.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Temu Jaringan ini dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi secara nasional antara pusat jaringan nasional dengan simpul jaringan. Sebagaimana diamanatkan di Undang-undang 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dengan pemangku kepentingan untuk pembuatan layanan informasi kearsipan kepada masyarakat.

Dalam rangkaian acara rakor pada hari pertama ini, dirilis aplikasi SIKN JIKN versi terbaru oleh Kepala ANRI dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi DIY. **(za)**